

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH BERBASIS RISET DI KABUPATEN BREBES: PELUANG DAN TANTANGAN

Muhammad Siwi Nugraha

Baperlitbangda Kabupaten Brebes
muhammadsiji@gmail.com

Jurnal Ultras

Volume 8 Nomor 1 (hlm. 26 – 31)

Info Artikel:

Diterima: 13 Desember 2024

Disetujui: 13 Desember 2024

Kata Kunci :

Sistem inovasi daerah; Inovasi Berbasis riset; inovasi sektor publik

Keywords :

Regional innovation system; Research-based innovation, public sector innovation

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguraikan rekomendasi kebijakan alternatif dalam memperkuat inovasi berbasis penelitian daerah di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2024 dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui tinjauan dokumen yang bersumber dari regulasi, pengukuran indeks inovasi daerah, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan dalam memperkuat inovasi daerah, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dorongan kepada manajer menengah dan staf garis depan untuk mengajukan proposal inovasi. Manajer menengah dan staf garis depan memegang peranan penting karena mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap aktivitas sehari-hari serta menghadapi berbagai permasalahan dalam kegiatan operasional harian.

Studi ini juga menunjukkan beberapa peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang teridentifikasi antara lain adalah jumlah peneliti di lembaga penelitian pemerintah yang dapat memberikan pendampingan kepada berbagai instansi pemerintah di Brebes dalam mengembangkan inovasi. Selain itu, jumlah staf garis depan yang besar juga menjadi peluang untuk mengembangkan lebih banyak inovasi. Namun, terdapat pula tantangan dalam mengembangkan inovasi berbasis penelitian di Kabupaten Brebes, seperti keterbatasan anggaran.

Abstract

The aim of this article is to elaborate alternative policy recommendation for strengthening regional research-based innovation in Brebes Regency. The research was conducted in November-December 2024 using qualitative method. Data was obtained from review of documents sourced from regulations, measurement of the regional innovation index, and any other related document. The result of the study revealed that to implement the policy in strengthening regional innovation policy, local government should consider to encourage middle managers and front line staff to make proposal of innovation. The middle managers and front line staff played important role because middle managers and front line staff have good understanding in daily activities. They face any issues in day to day activities. The study also shows some

oportunities and challenges. Some oportunities such us the numbers of researcher in government research agency can give asistance for any government agency in Brebes to develop innovation. The huge numbers of

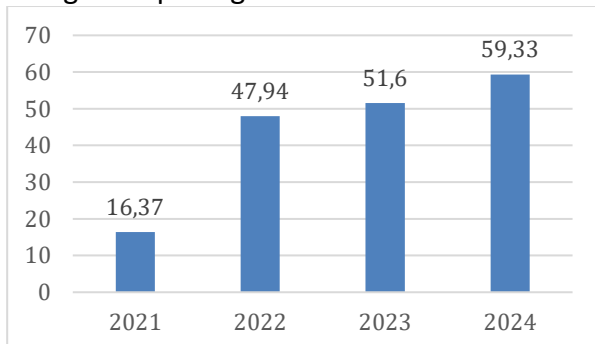
front line staff is also give other opportunity to develop more innovations. Some challanges faced in developing research based innovation in Brebes regency, such us budget limitation.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu daerah otonom dengan populasi penduduk tertinggi di Jawa Tengah, saat ini Kabupaten Brebes dihadapkan pada tantangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang mudah, murah, efektif, efisien serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan Inovasi di setiap urusan pemerintahan daerah. Serangkaian inovasi telah diterapkan di berbagai perangkat daerah di Kabupaten Brebes. Inovasi daerah yang diselenggarakan oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Brebes merentang dari pelayanan kesehatan, pendidikan, penataan ruang, hingga kepegawaian.

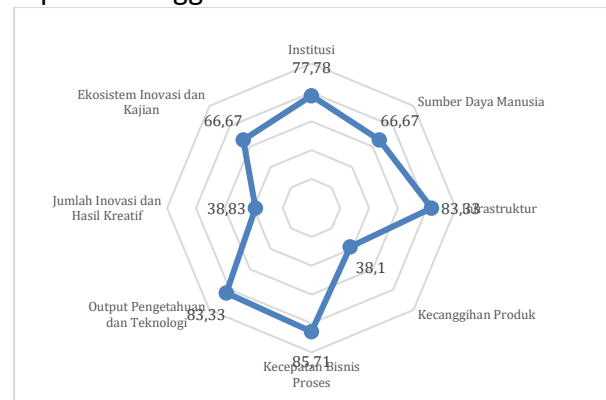
Dilihat dari nilai Indeks Inovasi Daerah yang dirilis oleh Kementeraian Dalam Negeri, Kabupaten Brebes termasuk sebagai salah satu daerah dengan kategori daerah inovatif. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pasca 2021, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes secara konsisten mengalami peningkatan.



Gambar. 1 Nilai Indeks Inovasi Daerah 2021-2024

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2021-2024)

Peningkatan nilai indeks inovasi daerah di Kabupaten Brebes menunjukkan adanya peningkatan dari aspek jumlah inovasi yang dikembangkan oleh berbagai perangkat daerah di Kabupaten Brebes. Namun demikian, berdasarkan hasil penilaian menyeluruh terhadap 8 aspek inovasi daerah yang meliputi aspek institusi, sumber daya manusia, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, otput pengetahuan dan teknologi, jumlah inovasi dan hasil kreatif, serta ekosistem inovasi dan kajian, terdapat dua aspek yang menjadi kelemahan Kabupaten Brebes. Dua aspek tersebut adalah aspek Jumlah Inovasi dan hasil Kreatif serta aspek Kecanggihan Produk.



Gambar 2. Aspek Nilai Inovasi Daerah Kabupaten Brebes 2024

Sumber: Diolah dari Kementerian Dalam Negeri (2024)

Rendahnya nilai aspek Jumlah Inovasi dan hasil kreatif serta nilai aspek kecanggihan produk perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, terutama Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah. Rendahnya kedua nilai aspek tersebut menjadi indikasi bahwa sistem inovasi daerah di Kabupaten Brebes perlu diperkuat.

Berangkat dari persoalan di atas, artikel ini berupaya mengulas bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat sistem inovasi daerah, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam memperkuat sistem inovasi daerah di Kabupaten Brebes.

TINJAUAN PUSTAKA

Di era global seperti saat ini, semua negara dituntut untuk dapat membuat perubahan yang adaptif untuk merangkul semua masyarakat tanpa ada yang tertinggal (Suranto & Darumurti, 2024). Untuk itu, inovasi diperlukan sebagai upaya untuk menyusun membawa perubahan yang berdampak. Inovasi, sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai literatur, berbeda dengan invensi. Inovasi dapat diartikan sebagai perubahan yang berkaitan dengan penciptaan dan adopsi ide-ide baru (Suryanto & Meita Ahadiyati, 2009). Sementara invensi merujuk pada penemuan yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Menurut Schumpeter (1947 dalam Damuri et al., 2018), inovasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan sesuatu dengan cara yang baru. Inovasi di sektor publik berbeda dengan inovasi di sektor swasta. Di sektor swasta, inovasi diarahkan untuk memenangkan kompetisi dan persaingan di dunia usaha, memperoleh konsumen baru terhadap produk tertentu, atau memperoleh pelanggan yang lebih banyak terhadap jasa layanan tertentu.

Di sektor publik, inovasi diharapkan hadir sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses pelayanan, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Dalam tantangan dan dinamika dalam era globalisasi, inovasi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat memaksa pemerintah

untuk tidak hanya menyesuaikan kebijakan eksisting, tetapi juga mendesain kebijakan baru yang dapat menjawab tantangan di masa depan (Suhindarno et al., 2024).

Saat ini inovasi telah dipandang sebagai alat utama untuk memperbaiki pelayanan publik oleh pemerintah di berbagai negara di dunia (Walker, 2006). Pentingnya inovasi dalam pelayanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Randini & Muslim, 2024).

Inovasi telah menjadi salah satu bidang kajian sejak awal abad ke-20 (Yunus et al., 2024). Studi mengenai inovasi semakin berkembang pesat sebagai sejak seperempat abad terakhir (Djellal et al., 2013). Perhatian terhadap inovasi di sektor publik semakin tinggi sejak beberapa tahun terakhir, ketika inovasi menjadi agenda politik dan agenda administratif di banyak negara maju dan meluas di negara-negara berkembang (Pratama, 2020).

Berbagai penelitian terkait inovasi di sektor publik telah banyak dilakukan dengan beragam fokus penelitian. Fokus penelitian inovasi di sektor publik merentang dari aspek kelembagaan hingga kapasitas birokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Smith & Taebel, 1985) di awal berkembangnya riset tentang inovasi mengulas tentang faktor-faktor penentu inovasi administrasi di birokrasi pemerintahan di tingkat kota di Amerika Serikat. Sementara itu, (Considine & Lewis, 2007) mengulas tentang peran politisi dan birokrat dalam mendorong inovasi di sektor publik. (Wu et al., 2013) meneliti tentang tipologi inovasi di sektor publik di China antara tahun 2001-2008. Sementara itu, (Moussa et al., 2018) mengungkapkan bahwa tantangan utama birokrasi dalam meningkatkan kapasitas inovasi adalah mengembangkan sistem, proses, dan ilim yang mendukung penciptaan inovasi dan kreatifitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Gonzalez et al., 2013) yang meneliti tentang

perilaku inovatif di Pemerintah Kota di Spanyol mengungkap bahwa sebagian besar inovasi muncul berdasarkan ide-ide yang diusung secara kolaboratif.

Penelitian mengenai inovasi di sektor publik di Indonesia juga telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto & Meita Ahadiyati, 2009) mengulas tentang gambaran empiris inovasi yang diselenggarakan oleh beberapa daerah pasca satu dekade implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia.

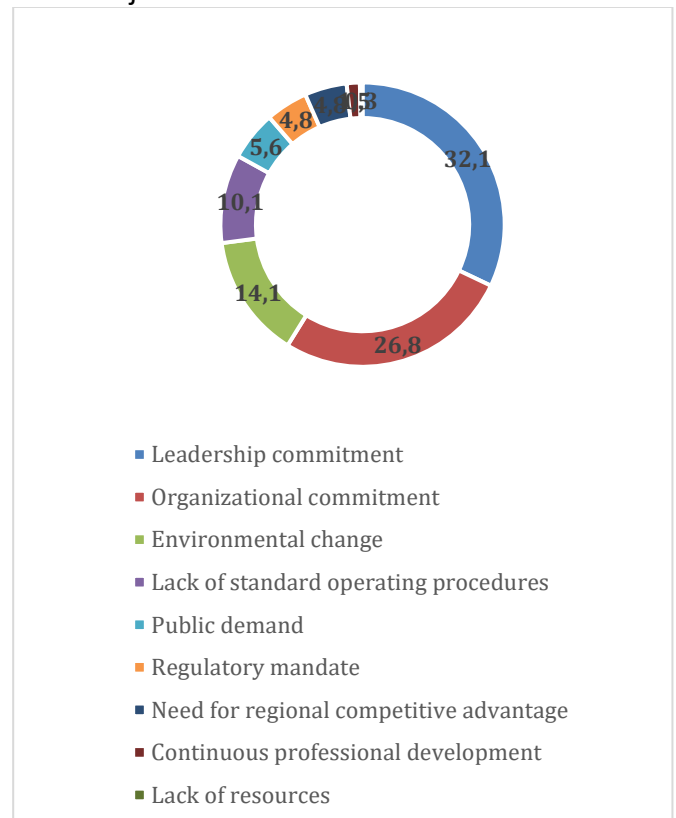
Di Indonesia, penyediaan pelayanan publik menjadi sebuah isu kebijakan strategis karena perbaikan pelayanan publik terkesan berjalan di tempat, yang berimplikasi sangat luas (Yunus et al., 2024). Di era otonom di mana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan mengelola penyelenggaraan pelayanan publik, masih cukup banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Inovasi pelayanan publik di Indonesia pada dasarnya mulai masif dilakukan, terutama oleh pemerintah daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa daerah yang dianggap sebagai pionir penyelenggara inovasi daerah antara lain Jembrana, Tanah Datar, Solok, Sragen, Sleman dan Sidoarjo (Suryanto & Meita Ahadiyati, 2009). Sejak berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, banyak inovasi dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, terutama di tingkat daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Berkembangnya Inovasi di sektor publik di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Di lingkup internal organisasi, inovasi tidak terlepas dari keterbatasan

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, inisiatif dari internal organisasi, baik pimpinan maupun staf. Sementara itu, dari luar organisasi, inovasi di sektor publik muncul dari tuntutan masyarakat yang mengharapkan perbaikan kualitas pelayanan. Pada dasarnya masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada sektor swasta, namun demikian, masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik dengan prosedur yang jelas.

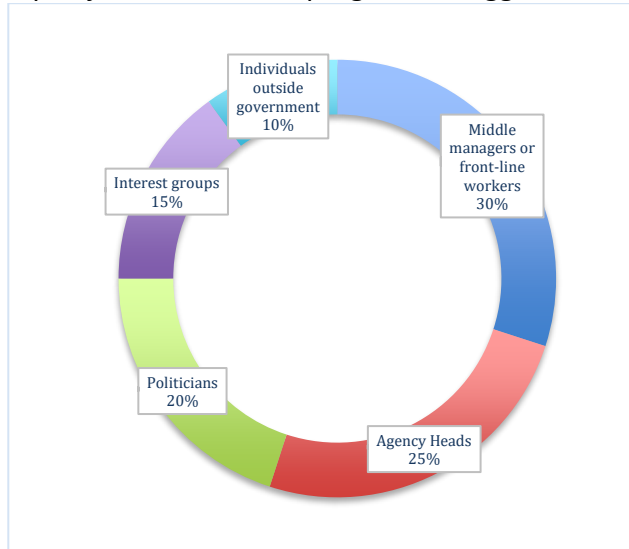
Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh (Kusumasari et al., 2019) menunjukkan bahwa terdapat sembilan faktor tersebut meliputi komitmen kepemimpinan, perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, kebutuhan terhadap keunggulan kompetitif wilayah, minimnya sumberdaya, komitmen organisasi, ketiadaan SOP, perintah Undang-Undang, dan pengembangan secara berkelanjutan.



Gambar 3. Faktor yang Menentukan Dalam Terciptanya Inovasi di Lingkungan Pemerintahan di Indonesia

Sumber: diolah dari Kusumasari et al., (2019)

Dalam hal inisiator inovasi, penelitian (Borins, 2001) menunjukkan bahwa sebagian besar inisiator inovasi berasal dari manajer di tingkat menengah dan staf pelaksana. Besarnya jumlah inisiator inovasi yang berasal dari manajer tingkat menengah dan staf pelaksana tidak terlepas dari fakta bahwa staf pelaksana lebih dekat dengan pekerjaan di tingkat operasional. Selain itu, manajer di tingkat menengah dan staf pelaksana juga lebih dekat dengan konsep-konsep dan teori yang dipelajari dari sekolah/ perguruan tinggi.



Gambar 4. Inisiator Inovasi di Sektor Publik
Sumber: diolah dari Borins, (2001)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kabupaten Brebes menjadi lokus penelitian karena populasi penduduk yang mencapai 2.043.077 jiwa pada tahun 2024. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar tanpa ada warga yang tertinggal. Data diperoleh melalui penelusuran dokumen yang relevan, seperti regulasi terkait dengan inovasi daerah, data indeks inovasi daerah, dan lainnya.

HASIL DAN DISKUSI

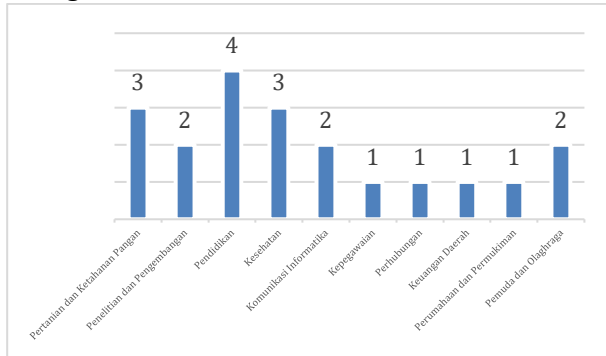
Sebagai salah satu entitas pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes pada dasarnya telah menerapkan beragam inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Bahkan, salah satu inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pernah berhasil menjadi salah satu dari 45 inovasi terbaik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat nasional pada tahun 2019. Inovasi tersebut adalah Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), sebuah inovasi yang diinsiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes. Inovasi GKB bertujuan untuk mengembalikan anak putus sekolah, agar bersedia kembali menempuh pendidikan.

Meskipun inovasi Kabupaten Brebes mampu menjadi salah satu dari 45 inovasi terbaik di tingkat nasional di tahun 2019, pada tahun 2021 Kabupaten Brebes mendapat predikat sebagai daerah kurang inovatif dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes tahun 2021 adalah 16,37. Capaian tersebut juga menempatkan Kabupaten Brebes sebagai satu-satunya daerah dengan predikat kurang inovatif di tahun 2021.

Pada dasarnya, predikat sebagai daerah kurang inovatif dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah disebabkan kurang tertibnya proses administrasi sehingga pada saat pengukuran, hanya sedikit data dukung yang dapat dikumpulkan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

Di tahun berikutnya, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes meningkat signifikan menjadi 47,94. Di tahun 2022 tersebut terdapat 20 inovasi daerah yang menjadi data dukung dalam pengukuran

Indeks Inovasi Daerah. Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Brebes tidak lagi sebagai daerah kurang inovatif, berubah menjadi daerah dengan kategori inovatif. 20 Inovasi daerah yang dinilai dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar.3

Sebaran Inovasi Daerah yang Dinilai Dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

Sumber: diolah dari Kemendagri (2022)

Di tahun 2022, sebagai upaya menguatkan sistem inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes menetapkan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Di tahun yang sama, upaya memperkuat sistem inovasi daerah juga dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti desk inovasi daerah, sosialisasi, dan pembuatan portal informasi inovasi daerah.

Di tahun 2023, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes juga mengalami peningkatan, seiring dengan semakin banyaknya jumlah inovasi daerah yang dinilai dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Di tahun 2023, terdapat 57 inovasi yang dinilai dalam pengukuran indeks Inovasi Daerah, dimana pada tahun tersebut nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 51,6.

Dari 57 inovasi yang dinilai dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah, 31 inovasi daerah diantaranya adalah inovasi di bidang kesehatan. Banyaknya inovasi di bidang kesehatan tersebut berasal dari inovasi yang

diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Kabupaten Brebes. 26 Inovasi lainnya merupakan inovasi dari berbagai urusan pemerintahan, seperti pendidikan, penelitian dan pengembangan, kelautan dan perikanan, dan pekerjaan umum.

Di tahun 2024, nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Brebes kembali mengalami peningkatan menjadi 59,33. Jumlah inovasi yang dinilai dalam pengukuran Indeks Inovasi 2024 adalah 48 inovasi. Meskipun jumlah inovasi yang dikirim lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, nilai kematangan masing-masing inovasi yang dinilai lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Yang menjadi persoalan, meskipun nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2022, nilai aspek jumlah dan kecanggihan produk masih rendah dibanding aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem inovasi daerah dari hulu, tengah, hingga hilir. Penguatan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah saja. Lebih dari itu, penguatan sistem inovasi daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Brebes lebih efektif, efisien, dan responsif sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Upaya penguatan sistem inovasi daerah di level hulu dapat dilakukan sejak mulai inisiasi penyusunan inovasi. Inisiasi inovasi daerah yang dilakukan selama ini lebih banyak bersifat *top down*, dimana banyak inovasi lebih sering diinisiasi oleh pimpinan organisasi. Upaya penguatan sistem inovasi daerah di tahap inisiasi dapat dilakukan secara dua arah, baik secara *top down* maupun *bottom up*. Secara *top down*, inovasi dapat diinisiasi oleh Kepala lembaga/ kepala satuan kerja. Inovasi juga dapat berasal dari proyek perubahan yang diusulkan oleh kepala perangkat daerah. Sementara itu, secara *bottom up*, inovasi juga dapat diusulkan oleh

staf pelaksana dan juga *middle-managers*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Borins, (2001), bahwa inisiasi inovasi dapat dilakukan oleh setiap organisasi, termasuk middle-manager (dalam birokrasi daerah, setingkat kepala bagian/kepala bidang) dan juga staf pelaksana.

Untuk memacu munculnya inisiasi inovasi daerah yang berasal dari staf pelaksana dan middle manager, pemerintah Kabupaten Brebes dapat menstimulasi dengan program pembinaan dan pemberian penghargaan berbasis kompetisi. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2021) tentang pengaruh motivasi melayani dan keinginan untuk mendapat materi terhadap perilaku kerja yang inovatif dalam lingkungan birokrasi menunjukkan adanya keterkaitan antara keinginan memperoleh materi dengan perilaku kerja yang inovatif. Oleh karena itu, pemberian insentif secara kompetitif terhadap staf pelaksana yang berhasil membuat inisiasi inovasi perlu didukung untuk menciptakan budaya kerja yang inovatif. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi.

Kompetisi inisiasi inovasi idealnya tidak berhenti pada selesainya kompetisi, melainkan perlu tindak lanjut agar inovasi daerah dapat berjalan dan berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penguatan sistem inovasi di tingkat tengah dilakukan melalui upaya monitoring keberlanjutan penerapan inovasi daerah. Monitoring dilakukan untuk memantau kendala pelaksanaan inovasi, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan agar inovasi dapat berlanjut dan yang utama adalah inovasi tetap dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di level hilir, upaya penguatan sistem inovasi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai seberapa dampak yang dihasilkan dari adanya inovasi tersebut, baik dalam hal proses bisnis kegiatan di internal organisasi, hingga penerima manfaat.

Tantangan dan Peluang Penguatan Inovasi

Terdapat beberapa tantangan dalam upaya penguatan inovasi daerah di Kabupaten Brebes. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, ketidakpastian terkait luaran dari inovasi, budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan inovasi daerah di Kabupaten Brebes. Adanya regulasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, semakin memperkuat peran perangkat daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah dalam mengorkestrasi stakeholder riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Brebes. Selain itu, tersedianya SDM peneliti yang ada di Baperlitbangda dapat berperan sebagai fasilitator dalam upaya pengembangan inisiasi inovasi, monitoring, dan evaluasi inovasi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masih rendahnya aspek jumlah inovasi dan kecanggihan produk dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah merupakan persoalan krusial yang perlu direspon melalui upaya penguatan sistem inovasi daerah. Penguatan sistem inovasi daerah perlu dilakukan dari hulu, tengah, hingga hilir. Di bagian hulu, perlu adanya pemberian penghargaan bagi birokrat di level menengah dan pelaksana yang melakukan inisiasi inovasi. Di tengah, perlu adanya monitoring terhadap pelaksanaan inovasi, dan di bagian hulu pelaksanaan evaluasi yang terukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan inovasi memberi dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam memperkuat sistem inovasi daerah, terdapat beberapa tantangan seperti ketidakpastian terkait luaran dari inovasi, budaya birokrasi yang resisten terhadap perubahan. Di sisi lain, terdapat peluang penguatan inovasi daerah di Kabupaten Brebes. Adanya regulasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, semakin memperkuat peran perangkat daerah yang membidangi Riset dan Inovasi Daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Baperlitbangda). Selain itu, tersedianya SDM peneliti yang ada di Baperlitbangda dapat berperan sebagai fasilitator dalam upaya pengembangan inisiasi inovasi, monitoring, dan evaluasi inovasi daerah.

Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah yang Untuk meningkatkan jumlah inovasi daerah di Kabupaten Brebes, Kepala Daerah perlu mendorong setiap kepala perangkat daerah untuk menciptakan setidaknya dua inovasi dalam satu tahun. Komitmen pimpinan tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, upaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan kecanggihan produk inovasi dapat dilakukan melalui penyelenggaraan inkubasi inovasi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dikoordinasi oleh Baperlitbangda/Bapperida bekerjasama dengan Bagian Organisasi. Kegiatan inkubasi inovasi diharapkan mampu memunculkan gagasan inovasi baru sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Kegiatan inkubasi juga melibatkan peneliti di Baperlitbangda dan akademisi dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kecanggihan produk inovasi yang dihasilkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta rekan peneliti yang telah memfasilitasi diskusi dan diseminasi hasil penelitian tahun 2024. meningkatkan kualitas dan kecanggihan produk inovasi yang dihasilkan

DAFTAR PUSTAKA

- Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 310–319.
<https://doi.org/10.1108/14691930110400128>
- Considine, M., & Lewis, J. M. (2007). Innovation and innovators inside government: From institutions to networks. *Governance*, 20(4), 581–607.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00373.x>
- Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., & Christian, D. (2018). Innovation Policy in Indonesia. *Innovation Policy in Asean*, 98–127.
http://www.eria.org/uploads/media/5.ERIA_Innovation_Policy_ASEAN_Chapter_4.pdf
- Djellal, F., Gallouj, F., & Miles, I. (2013). Two decades of research on innovation in services: Which place for public services? *Structural Change and Economic Dynamics*, 27, 98–117.
<https://doi.org/10.1016/j.strueco.2013.06.005>
- Gonzalez, R., Llopis, J., & Gasco, J. (2013). *Innovation in Public Services: The Case of Spanish Local Government*.
- Kusumasari, B., Pramusinto, A., Santoso, A. D., & Fathin, C. A. (2019). What shapes public sector innovation? *Public Policy and Administration*, 18(4), 430–446.
<https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05>
- Moussa, M., McMurray, A., & Muenjohn, N. (2018). Innovation and Leadership in Public Sector Organizations. *Journal of Management Research*, 10(3), 14.

- <https://doi.org/10.5296/jmr.v10i3.13101>
Pratama, A. B. (2020). The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. *Innovation and Management Review*, 17(1), 25–40.
<https://doi.org/10.1108/INMR-11-2018-0080>
- Randini, H. P., & Muslim, M. A. (2024). Public Service Innovation: Drawing Inspiration from The Success of Developed Countries to Improve Public Services in Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(8), 1682–1686.
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i8.637>
- Smith, A. C., & Taebel, D. A. (1985). Administrative innovation in municipal government. *International Journal of Public Administration*, 7(2), 149–177.
<https://doi.org/10.1080/01900698508524487>
- Suhindarno, H., Katili, A. Y., & Nggilu, R. (2024). Innovation In Public Policy Development : Challenges And Opportunities For Public Administration. *Socius Journal*, 1(4), 30–35.
<https://doi.org/10.62872/sbe22z03>
- Suranto, S., & Darumurti, A. (2024). Local Wisdom-Based Policy Innovation in Indonesia During 2018-2021. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 60–70.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i1.16920>
- Suryanto, A., & Meita Ahadiyati. (2009). Promoting Public Service Performance Through Innovation and Administrative Reforms at Local Level: Lessons from a Decade of Decentralization in Indonesia. *The International Conference for Administrative Development: Towards Excellence in Public Sector Performance*, 1–25.
- Susanto, E. (2021). Does love of money matter for innovative work behavior in public sector organizations? Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 34(1), 71–85.
<https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2020-0028>
- Walker, R. M. (2006). Innovation type and diffusion: An empirical analysis of local government. *Public Administration*, 84(2), 311–335. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00004.x>
- Wu, J., Ma, L., & Yang, Y. (2013). Innovation in the Chinese public sector: Typology and distribution. *Public Administration*, 91(2), 347–365. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.02010.x>
- Yunus, M., Karisma, Yani, A. A., Susanti, G., & Ismail, N. (2024). Service innovation in public health: A case study of an Indonesian local government. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 11(1), 14–26.
<https://doi.org/10.18488/74.v11i1.3705>